



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG
SETIAP GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kota Langsa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 273);
 9. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong yang berada di Kota Langsa;
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permasyarakatan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Gampong adalah Kepala Gampong (Geuchik) dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Gampong;
5. Jumlah Gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

Pasal 2

Pasal 2

Peraturan ini menetapkan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Langsa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Langsa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a.
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana gampong setiap gampong dalam Kota Langsa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong dalam Kota Langsa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin gampong setiap terhadap total penduduk miskin dalam Kota Langsa

Z3 = rasio luas wilayah gampong setiap terhadap luas wilayah dalam Kota Langsa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG dalam Kota Langsa

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Geuchik menyampaikan:
 - a. APBGampong paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan setelah

Geuchik

- Geuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong semester I.
- (6) Rincian Dana Gampong yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBGampong.

Pasal 6

- Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBGampong harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Gampong yang mengakibatkan beban APBGampong tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Gampong tentang APBGampong ditetapkan menjadi peraturan Gampong.
- (4) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Geuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Menunda penyaluran Dana Gampong dalam hal Geuchik tidak menyampaikan APBGampong dan/atau laporan

realisasi....

- realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBGampong dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
 - (3) Walikota mengurangi penyaluran dana Gampong dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
 - (4) SiLPA Dana Gampong yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Gampong yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Gampong yang diterima Gampong.
 - (5) Penggunaan Dana Gampong yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota.
 - (6) Pengurangan Dana Gampong dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Ra'jab 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Ra'jab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 526

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

LAMPIRAN:
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 10 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG
 SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA
 TAHUN ANGGARAN 2015.

NO	NAMA GAMPONG		PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH PAGU
			40%	40%	20%	100%
1	2	3	4	5	6	
I	KECAMATAN LANGSA TIMUR					
	1	BUKET MEDANG ARA	109,659,120,-	109,659,120,-	54,829,560,-	274,147,799,-
	2	MATANG SEUTUI	108,767,862,-	108,767,862,-	54,383,931,-	271,919,656,-
	3	BUKET PULO	108,004,413,-	108,004,413,-	54,002,207,-	270,011,034,-
	4	MATANG PANYANG	111,057,982,-	111,057,982,-	55,528,991,-	277,644,956,-
	5	SIMPANG WIE	108,869,663,-	108,869,663,-	54,434,831,-	272,174,157,-
	6	BUKET RATA	110,941,587,-	110,941,587,-	55,470,793,-	277,353,967,-
	7	BUKET MEUTUAH	111,619,527,-	111,619,527,-	55,809,763,-	279,048,817,-
	8	ALUE MERBAU	113,234,414,-	113,234,414,-	56,617,207,-	283,086,034,-
	9	MATANG CENGAI	112,300,575,-	112,300,575,-	56,150,287,-	280,751,437,-
	10	SEUNEBOK ANTARA	110,174,842,-	110,174,842,-	55,087,421,-	275,437,105,-
	11	ALUE PINEUNG	111,919,801,-	111,919,801,-	55,959,901,-	279,799,503,-
	12	SUKAREJO	112,412,263,-	112,412,263,-	56,206,131,-	281,030,657,-
	13	CINTA RAJA	115,095,667,-	115,095,667,-	57,547,833,-	287,739,167,-
	14	SUNGAI LUENG	113,089,737,-	113,089,737,-	56,544,868,-	282,724,341,-
	15	ALUE PINEUNG TIMUE	110,293,825,-	110,293,825,-	55,146,913,-	275,734,564,-
	16	KAPA	107,980,229,-	107,980,229,-	53,990,114,-	269,950,572,-
II	KECAMATAN LANGSA BARAT					
	1	LHOK BANIE	123,167,340,-	123,167,340,-	61,583,670,-	307,918,349,-
	2	PAYA BUJOK TEUNGOH	111,527,192,-	111,527,192,-	55,763,596,-	278,817,980,-
	3	PAYA BUJOK BEURAMO	112,178,361,-	112,178,361,-	56,089,181,-	280,445,903,-
	4	SIMPANG LHEE	111,563,395,-	111,563,395,-	55,781,698,-	278,908,489,-
	5	SEURIGET	112,766,584,-	112,766,584,-	56,383,292,-	281,916,460,-
	6	MATANG SEULIMENG	128,541,197,-	128,541,197,-	64,270,599,-	321,352,993,-
	7	SUNGAI PAUH	118,383,269,-	118,383,269,-	59,191,635,-	295,958,173,-
	8	KUALA LANGSA	121,053,793,-	121,053,793,-	60,526,896,-	302,634,482,-
	9	TELAGA TUJUH	123,481,928,-	123,481,928,-	61,740,964,-	308,704,820,-
	10	SERAMBI INDAH	108,353,772,-	108,353,772,-	54,176,886,-	270,884,431,-
	11	SUNGAI PAUH PUSAKA	116,345,843,-	116,345,843,-	58,172,922,-	290,864,609,-
	12	SUNGAI PAUH TANJONG	116,581,633,-	116,581,633,-	58,290,816,-	291,454,082,-
	13	SUNGAI PAUH FIRDAUS	110,488,564,-	110,488,564,-	55,244,282,-	276,221,411,-
III	KECAMATAN LANGSA KOTA					
	1	TEUNGOH	126,395,397,-	126,395,397,-	63,197,699,-	315,988,493,-
	2	PEUKAN LANGSA	107,858,401,-	107,858,401,-	53,929,200,-	269,646,002,-
	3	JAWA	129,289,697,-	129,289,697,-	64,644,849,-	323,224,243,-
	4	PAYA BUJOK BLANG PASE	119,193,366,-	119,193,366,-	59,596,683,-	297,983,416,-
	5	BLANG	111,658,618,-	111,658,618,-	55,829,309,-	279,146,545,-
	6	ALUE BEURAWÉ	116,809,594,-	116,809,594,-	58,404,797,-	292,023,986,-
	7	DAULAT	108,480,011,-	108,480,011,-	54,240,005,-	271,200,027,-
	8	MEUTIA	113,285,481,-	113,285,481,-	56,642,740,-	283,213,702,-
	9	BLANG SEUNIBONG	114,445,656,-	114,445,656,-	57,222,828,-	286,114,141,-
	10	TUALANG TEUNGOH	115,325,419,-	115,325,419,-	57,662,709,-	288,313,547,-

IV. KECAMATAN

1	2	3	4	5	6	
IV	KECAMATAN LANGSA LAMA					
	1	PONDOK KEMUNING	119,193,371,-	119,193,371,-	59,596,685,-	297,983,427,-
	2	SEULALAH	113,780,069,-	113,780,069,-	56,890,034,-	284,450,172,-
	3	PONDOK PABRIK	112,125,833,-	112,125,833,-	56,062,917,-	280,314,583,-
	4	SIDODADI	113,827,327,-	113,827,327,-	56,913,663,-	284,568,317,-
	5	SIDOREJO	118,390,554,-	118,390,554,-	59,195,277,-	295,976,386,-
	6	BARO	111,459,429,-	111,459,429,-	55,729,715,-	278,648,573,-
	7	MEURANDEH	109,712,273,-	109,712,273,-	54,856,136,-	274,280,682,-
	8	ASAM PEUTIK	112,556,376,-	112,556,376,-	56,278,188,-	281,390,941,-
	9	BAROH LANGSA LAMA	119,063,033,-	119,063,033,-	59,531,516,-	297,657,582,-
	10	SEULALAH BARU	112,479,755,-	112,479,755,-	56,239,877,-	281,199,387,-
	11	SUKA JADI KEBUN IRENG	112,840,034,-	112,840,034,-	56,420,017,-	282,100,086,-
	12	MEURANDEH TEUNGOH	110,374,098,-	110,374,098,-	55,187,049,-	275,935,244,-
	13	MEURANDEH DAYAH	110,048,026,-	110,048,026,-	55,024,013,-	275,120,064,-
	14	MEURANDEH ACEH	110,220,759,-	110,220,759,-	55,110,379,-	275,551,897,-
	15	BATE PUTEH	110,867,285,-	110,867,285,-	55,433,642,-	277,168,212,-
V	KECAMATAN LANGSA BARO					
	1	TIMBANG LANGSA	115,495,634,-	115,495,634,-	57,747,817,-	288,739,084,-
	2	ALUE DUA	113,525,407,-	113,525,407,-	56,762,703,-	283,813,517,-
	3	BIREM PUNTONG	116,058,720,-	116,058,720,-	58,029,360,-	290,146,801,-
	4	PAYA BUJOK SEULEUMAK	137,509,846,-	137,509,846,-	68,754,923,-	343,774,614,-
	5	PONDOK KELAPA	113,642,161,-	113,642,161,-	56,821,080,-	284,105,402,-
	6	KARANG ANYAR	115,394,146,-	115,394,146,-	57,697,073,-	288,485,365,-
	7	PAYA BUJOK TUNONG	121,646,655,-	121,646,655,-	60,823,328,-	304,116,638,-
	8	GEUDUBANG JAWA	115,733,324,-	115,733,324,-	57,866,662,-	289,333,310,-
	9	GEUDUBANG ACEH	113,544,591,-	113,544,591,-	56,772,296,-	283,861,479,-
	10	ALUE DUA BAKARAN BATE	115,531,609,-	115,531,609,-	57,765,805,-	288,829,023,-
	11	LENGKONG	115,878,787,-	115,878,787,-	57,939,393,-	289,696,967,-
	12	SUKA JADI MAKMUR	111,762,880,-	111,762,880,-	55,881,440,-	279,407,200,-
	TOTAL		7,555,258,000,-	7,555,258,000,-	3,777,629,000	18,888,145,000,-

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

